

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit), 2010.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, cet. ke-7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2017.
- Badruzaman, Mariam Darius, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, cet. ke-2, (Bandung: Penerbit Alumni), 1993.
- Daliyo, J. B., et.al., *Penantar Ilmu Hukum (Buku Panduan Mahasiswa)*, cet. ke-2, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 1992.
- Efendi Jonaedi, et.al., cet. ke -1, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2016.
- Hajati, Sri, et.al., *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press), 2017.
- _____, *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, cet. ke-1, (Airlangga University Press: Surabaya), 2018.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya)*, cet ke-10, (Jakarta: Djambatan), 2005.
- Hutabarat, Samuel M. P., *Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Grasindo), 2010.
- Hutagalung, Arie S., *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, cet. 1, (Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia), 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, cet. ke-13, (Jakarta: Kencana), 2017.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Hak-hak atas Tanah*, (Jakarta: Kencana), 2004.
- _____, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2006.
- Perangin, Effendi, *Hukum Agraria di Indonesia (Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum)*, (Jakarta:CV Rajawali), 1986.

Prajitno, A. A. Andi, *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)*, cet. ke-1, (Malang: Selaras), 2013.

Purnamasari, Irma Devita, *Kiat-Kita Cerdas, Mudah, dan Bijak Mengatasi Hukum Pertanahan*, cet. 2, (Bandung: PT Mizan Pustaka), 2011.

Santoso, Urip, *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*, cet. ke-1, (Depok: Kencana), 2017.

_____, *Perolehan Hak atas Tanah*, cet. ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group), 2015.

Satrio, J., *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, cet. ke-3, (Bandung: PT Alumni), 1999.

Simbolon, Laurensius Arliman, *Ilmu Perundang-Undangan yang Baik untuk Negara Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Deepublish), 2019.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, cet. ke-17, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2015.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet. ke-IV, (Jakarta: Ghalia), 1990.

Soetiknjo, Iman, *Politik Agraria Nasional: Hubungan Manusia dengan Tanah yang Berdasar Pancasila*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), 1983.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. ke-8, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 1989.

_____, *Hukum Perjanjian*, cet. ke-27, (Jakarta: PT Intermedia), 2014.

Sumardjono, Maria S. W., *Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak atas Tanah Beserta Bangunan bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing*, (Jakarta: Kompas), 2007.

Sutedi, Adrian, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, cet. ke-7, (Jakarta: Sinar Grafika), 2016.

II. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

Residential of Property Act of Singapore Chapter 274 (Revised Edition 31st July 2009 of the Act 18 of 1976).

III. Sumber Lainnya

Agus Setyadi Hadisusilo, “Tesis Perbandingan Hukum Perolehan Hak atas Tanah untuk Orang Asing di Indonesia Khususnya di Pulau Batam dengan Orang Asing di Negara Malaysia”, 2009, Universitas Diponegoro Semarang.

Anonim, “Orang Asing”, (<https://kbbi.kemendikbud.go.id>), diakses pada 11 Desember 2019.

Arimbi Ramadhiani, *Sofyan Djalil: Orang Asing Mau Bikin Istana, Silakan*”,
(<https://properti.kompas.com/read/2016/11/01/141807721/sofyan.djalil.orang.asing.mau.bikin.istana.silakan>), diakses pada 27 Oktober 2019.

Listyowati Sumanto, *Pembatasan Pemilikan Hak atas Tanah oleh Orang Asing dan Badan Hukum Asing*, Jurnal Hukum PRIORIS, vol. 3, nomor 3, 2013, hal. 80-81.

Wawancara dengan Agung Iriantoro, tanggal 15 Oktober 2019, di Jakarta.

Wawancara dengan Alwesius, tanggal 4 Desember 2019 di Depok.

Wawancara dengan Nazirwan, tanggal 4 Desember 2019, di Jakarta.

Wawancara dengan Aulia Taufani, tanggal 5 Desember 2019, di Jakarta.

